



**BUPATI TEMANGGUNG**  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 44 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56

- Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
  28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 12);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 11);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 79);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 10);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2108 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 91);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 26);
  43. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
  44. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
  45. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
  46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
  47. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 66);
  48. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6);
  49. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8);
  50. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9);

51. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 59);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23); Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 44);
56. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 68);
57. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 12);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 terdiri atas:

1. Pendapatan		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	249.681.536.344,00
b. Dana Perimbangan	Rp	1.157.136.797.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp</u>	<u>436.152.151.000,00 (+)</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.842.970.486.344,00
2. Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	727.717.447.777,00
2) Belanja Hibah	Rp	55.021.600.000,00
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	23.557.112.500,00
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	5.290.146.750,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	373.164.756.075,00
6) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp</u>	<u>500.000.000,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp	1.185.251.063.102,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp	106.033.104.936,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	379.019.452.259,00
3) Belanja Modal	<u>Rp</u>	<u>240.474.635.174,00 (+)</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp	725.527.192.369,00
Jumlah Belanja	Rp	1.910.778.255.471,00
Suplus/(Defisit)	Rp	(67.807.769.127,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp	82.807.769.127,00
b. Pengeluaran	<u>Rp</u>	<u>15.000.000.000,00 (-)</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	67.807.769.127,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.


Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG,  
  
M. AL KHADZIQ



Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 28 Desember 2018

P. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,  
  
SUYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 44





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**RINGKASAN PENJABARAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening 1	URAIAN 2	JUMLAH 3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.842.970.486.344,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.681.538.344,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	38.176.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.575.467.500,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.594.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	184.336.070.844,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.157.136.797.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	48.589.699.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	284.792.379.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	436.152.151.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	41.768.103.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4.3.6	Dana Desa	241.944.648.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.910.778.255.471,00</b>
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.251.063.102,00
5.1.1	Belanja Pegawai	727.717.447.777,00
5.1.4	Belanja Hibah	55.021.600.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.557.112.500,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	5.290.146.750,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	373.164.756.075,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	725.527.192.369,00
5.2.1	Belanja Pegawai	106.033.104.936,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	379.019.452.259,00
5.2.3	Belanja Modal	240.474.635.174,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.807.769.127,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.807.769.127,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa)	67.807.769.127,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00
6.2.5	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>67.807.769.127,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>


  
 BUPATI TEMANGGUNG  
  
 M. AL KHADZIQ



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK  
TAHUN ANGGARAN 2019**

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.842.970.486.344,00</b>
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.681.538.344,00
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	38.176.000.000,00
4.1.1.01	Pajak Hotel	216.000.000,00
4.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	121.000.000,00
4.1.1.01.06	Hotel Bintang Satu	40.000.000,00
4.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	38.000.000,00
4.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	17.000.000,00
4.1.1.02	Pajak Restoran	200.000.000,00
4.1.1.02.01	Restoran	142.075.000,00
4.1.1.02.02	Rumah Makan	55.245.000,00
4.1.1.02.04	Kantin	2.680.000,00
4.1.1.03	Pajak Hiburan	15.000.000,00
4.1.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	7.000.000,00
4.1.1.03.10	Permainan Bilyar	7.000.000,00
4.1.1.03.16	Panti Pijat/Refleksi	1.000.000,00
4.1.1.04	Pajak Reklame	550.000.000,00
4.1.1.04.01	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	400.000.000,00
4.1.1.04.02	Reklame Kain	140.000.000,00
4.1.1.04.04	Reklame Selebaran	10.000.000,00
4.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	16.200.000.000,00
4.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	16.200.000.000,00
4.1.1.07	Pajak Parkir	80.000.000,00
4.1.1.07.01	Pajak Parkir	80.000.000,00
4.1.1.08	Pajak Air Tanah	115.000.000,00
4.1.1.08.01	Pajak Air Tanah	115.000.000,00
4.1.1.12	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.000.000.000,00
4.1.1.12.01	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.000.000.000,00
4.1.1.13	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.800.000.000,00
4.1.1.13.01	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	7.800.000.000,00
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.575.467.500,00
4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	9.921.981.500,00
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	40.000.000,00
4.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	800.000.000,00
4.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15.000.000,00
4.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	750.000.000,00
4.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	3.922.694.500,00
4.1.2.01.13	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	250.000.000,00
4.1.2.01.14	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000,00
4.1.2.01.17	Retribusi Penempatan Awal Pedagang	4.094.287.000,00
4.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	2.263.486.000,00
4.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.578.500.000,00
4.1.2.02.04	Retribusi Terminal	227.986.000,00
4.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	38.000.000,00
4.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	84.000.000,00
4.1.2.02.13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	335.000.000,00
4.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.390.000.000,00
4.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.000.000,00
4.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	40.000.000,00
4.1.2.03.07	Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor	850.000.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.594.000.000,00
4.1.3.01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	12.594.000.000,00
4.1.3.01.01	Bank Jateng	5.523.041.500,00
4.1.3.01.02	Perusahaan Daerah Air Minum	600.000.000,00
4.1.3.01.03	Perusahaan Daerah Bank Pasar	4.620.958.500,00
4.1.3.01.04	Perusahaan Daerah Apotik Waringin Mulyo	170.000.000,00
4.1.3.01.05	Perusahaan Daerah BPR BKK Temanggung	1.200.000.000,00
4.1.3.01.07	Perusahaan Daerah Aneka Usaha	70.000.000,00
4.1.3.01.08	Perusahaan Daerah Bhumi Phala Wisata	400.000.000,00
4.1.3.01.09	PT Jamkrida Jateng	10.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	184.336.070.844,00
4.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00
4.1.4.01.07	Penjualan Drum Bekas	10.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.1.4.02	Jasa Giro	4.025.032.244,00
4.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	4.025.032.244,00
4.1.4.03	Pendapatan Bunga Deposito	6.606.091.106,00
4.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank Jateng	6.606.091.106,00
4.1.4.04	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.000.000,00
4.1.4.04.01	Kerugian Uang Daerah	5.000.000,00
4.1.4.07	Pendapatan Denda Pajak	144.000.000,00
4.1.4.07.12	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	144.000.000,00
4.1.4.08	Pendapatan Denda Retribusi	190.500.000,00
4.1.4.08.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000,00
4.1.4.08.04	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	82.500.000,00
4.1.4.08.05	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	8.000.000,00
4.1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	1.589.384.317,00
4.1.4.10.06	Pendapatan dari Pendapatan Lainnya	1.589.384.317,00
4.1.4.15	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	171.641.563.177,00
4.1.4.15.01	Pendapatan Rumah Sakit Umum (RSU)	130.000.000.000,00
4.1.4.15.02	Pendapatan Puskesmas	41.641.563.177,00
4.1.4.17	Pengelolaan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	124.500.000,00
4.1.4.17.01	Penerimaan LPP Radio Temanggung	24.500.000,00
4.1.4.17.02	Penerimaan LPP Temanggung TV	100.000.000,00
4.2	DANA PERIMBANGAN	1.157.136.797.000,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak	48.589.699.000,00
4.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	46.307.038.000,00
4.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	7.491.811.000,00
4.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	10.365.227.000,00
4.2.1.01.04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	28.450.000.000,00
4.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	2.282.661.000,00
4.2.1.02.02	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	275.487.000,00
4.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00
4.2.1.02.09	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	936.340.000,00
4.2.1.02.10	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	87.045.000,00
4.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Minerba	196.000,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000,00
4.2.2.01	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000,00
4.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	823.754.719.000,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	284.792.379.000,00
4.2.3.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler	67.336.377.000,00
4.2.3.01.01	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan	20.172.681.000,00
4.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan dan KB	22.639.583.000,00
4.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sanitasi	2.238.000.000,00
4.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perumahan dan Permukiman	2.756.250.000,00
4.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian	4.014.062.000,00
4.2.3.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan	832.710.000,00
4.2.3.01.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Jalan	14.683.091.000,00
4.2.3.02	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	192.221.721.000,00
4.2.3.02.02	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini	12.288.000.000,00
4.2.3.02.03	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	144.296.716.000,00
4.2.3.02.04	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	23.925.000,00
4.2.3.02.06	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	18.875.000.000,00
4.2.3.02.07	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana	5.531.412.000,00
4.2.3.02.09	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.991.860.000,00
4.2.3.02.11	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas	875.370.000,00
4.2.3.02.12	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan	4.049.000.000,00
4.2.3.02.13	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	3.377.400.000,00
4.2.3.02.14	DAK Non Fisik Pelayanan Kepariwisata	913.038.000,00
4.2.3.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan	25.234.281.000,00
4.2.3.03.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Air Minum	945.000.000,00
4.2.3.03.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pariwisata	1.559.300.000,00
4.2.3.03.05	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Sanitasi	1.500.000.000,00
4.2.3.03.06	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Jalan	12.014.979.000,00
4.2.3.03.07	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pasar	1.329.599.000,00
4.2.3.03.08	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Irigasi	7.124.163.000,00
4.2.3.03.09	Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	761.240.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	436.152.151.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	62.439.400.000,00
4.3.1.06	Pendapatan Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	62.439.400.000,00
4.3.1.06.01	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Dasar (SD)	43.424.865.556,00
4.3.1.06.02	Pendapatan Hibah BOS Sekolah Menengah Pertama (SMP)	19.014.534.444,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.000.000.000,00
4.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	90.000.000.000,00
4.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.742.180.348,00
4.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	13.431.902.769,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
4.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	22.850.300.662,00
4.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	55.236.114,00
4.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	33.920.380.107,00
4.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	41.768.103.000,00
4.3.4.03	Dana Insentif Daerah	41.768.103.000,00
4.3.4.03.01	Dana Insentif Daerah	41.768.103.000,00
4.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00
4.3.5.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00
4.3.5.01.01	Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah	0,00
4.3.6	Dana Desa	241.944.648.000,00
4.3.6.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	241.944.648.000,00
4.3.6.01.01	Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBN	241.944.648.000,00
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>1.910.778.255.471,00</b>
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.185.251.063.102,00
5.1.1	Belanja Pegawai	727.717.447.777,00
5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan	494.189.268.473,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	374.910.305.696,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	34.487.873.382,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	7.142.787.750,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	25.526.214.700,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	5.097.961.750,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	21.290.855.916,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	646.791.907,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.076.572,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	12.072.088.500,00
5.1.1.01.10	Uang Paket	86.058.000,00
5.1.1.01.11	Tunjangan Badan Musyawarah	29.414.700,00
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	55.906.200,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Badan Anggaran	29.414.700,00
5.1.1.01.14	Tunjangan Badan Kehormatan	9.317.700,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	144.333.000,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	4.276.800.000,00
5.1.1.01.18	Uang Jasa Pengabdian	430.290.000,00
5.1.1.01.19	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	2.720.230.000,00
5.1.1.01.21	Tunjangan Reses	1.417.500.000,00
5.1.1.01.22	Tunjangan Transportasi	3.810.048.000,00
5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	224.756.541.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	80.300.000.000,00
5.1.1.02.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja	135.900.000,00
5.1.1.02.07	Tunjangan Profesi Guru Sertifikasi	144.296.716.000,00
5.1.1.02.08	Tunjangan Profesi Guru Non Sertifikasi	23.925.000,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.522.000.000,00
5.1.1.03.01	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00
5.1.1.05	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	1.634.106.160,00
5.1.1.05.01	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	1.634.106.160,00
5.1.1.06	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	615.532.144,00
5.1.1.06.01	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	570.532.144,00
5.1.1.06.03	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45.000.000,00
5.1.4	Belanja Hibah	55.021.600.000,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	55.021.600.000,00
5.1.4.05.01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisa Swasta	55.021.600.000,00
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	23.557.112.500,00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	1.015.612.500,00
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	1.015.612.500,00
5.1.5.02	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.5.03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	22.491.500.000,00
5.1.5.03.01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	22.491.500.000,00
5.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa	5.290.146.750,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.817.600.000,00
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.817.600.000,00
5.1.6.05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	1.472.546.750,00
5.1.6.05.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	1.472.546.750,00
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/kabupaten/kota, Pemerintah Desa Dan Partai Politik	373.164.756.075,00
5.1.7.03	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	371.959.408.200,00
5.1.7.03.01	Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa bersifat Umum	331.992.349.000,00
5.1.7.03.02	Bantuan Keuangan Kabupaten Kepada Desa bersifat Khusus	39.967.059.200,00
5.1.7.05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.205.347.875,00
5.1.7.05.01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	1.205.347.875,00
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	500.000.000,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	725.527.192.369,00
5.2.1	Belanja Pegawai	106.033.104.936,00
5.2.1.01	Honorarium PNS	11.823.828.600,00
5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	6.454.937.600,00
5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	536.773.000,00
5.2.1.01.03	Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan	173.490.000,00
5.2.1.01.04	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	3.474.963.000,00
5.2.1.01.05	Honorarium Tim Penilai	444.665.000,00
5.2.1.01.06	Honorarium Forum Komunikasi Pimpinan	739.000.000,00
5.2.1.02	Honorarium Non PNS	66.857.326.736,00
5.2.1.02.01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	376.690.000,00
5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorrer/Tidak Tetap	52.763.389.336,00
5.2.1.02.03	Upah Tenaga Kerja	9.882.351.500,00
5.2.1.02.04	Honorarium Pelaksana Kegiatan	3.834.895.900,00
5.2.1.03	Uang Lembur	1.689.265.500,00
5.2.1.03.01	Uang Lembur PNS	1.252.578.000,00
5.2.1.03.02	Uang Lembur Non PNS	436.687.500,00
5.2.1.04	Belanja Pegawai BOS	15.000.000.000,00
5.2.1.04.01	Belanja Pegawai BOS SD	11.000.000.000,00
5.2.1.04.02	Belanja Pegawai BOS SMP	4.000.000.000,00
5.2.1.05	Belanja Pegawai BLUD	9.295.709.100,00
5.2.1.05.01	Belanja Pegawai BLUD RSU	7.325.000.000,00
5.2.1.05.02	Belanja Pegawai BLUD Puskesmas	1.970.709.100,00
5.2.1.06	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	1.366.975.000,00
5.2.1.06.01	Uang untuk diberikan kepada Pegawai Berprestasi	15.000.000,00
5.2.1.06.02	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat/Siswa Berprestasi	941.700.000,00
5.2.1.06.03	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga Berprestasi	410.275.000,00
5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	379.019.452.259,00
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	12.276.846.033,00
5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor	4.539.156.303,00
5.2.2.01.02	Belanja Dokumen/Administrasi Tender	6.800.000,00
5.2.2.01.03	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	135.719.510,00
5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	231.313.400,00
5.2.2.01.05	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	919.589.100,00
5.2.2.01.06	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	4.236.159.070,00
5.2.2.01.07	Belanja Pengisian Tabung Gas dan Tabung Pemadam Kebakaran	137.502.000,00
5.2.2.01.08	Belanja Alat-Alat Make Up	69.492.000,00
5.2.2.01.09	Belanja Lampu Penerangan dan Kelengkapannya	1.729.407.050,00
5.2.2.01.10	Belanja Alat-Alat Dapur	23.647.400,00
5.2.2.01.11	Belanja Alat-Alat Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	120.168.200,00
5.2.2.01.12	Belanja Alat Perlengkapan Kantor Lainnya	127.892.000,00
5.2.2.02	Belanja Bahan/Material	24.262.092.269,00
5.2.2.02.01	Belanja Bahan Baku Bangunan	13.281.519.102,00
5.2.2.02.02	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	460.190.900,00
5.2.2.02.03	Belanja Bibit Ternak	6.217.500,00
5.2.2.02.04	Belanja Bahan Obat-Obatan	4.586.535.581,00
5.2.2.02.05	Belanja Bahan Kimia	133.733.800,00
5.2.2.02.06	Belanja Bahan Benih Ikan	241.380.900,00
5.2.2.02.07	Belanja Pupuk Tanaman	80.646.100,00
5.2.2.02.08	Belanja Bahan Pakan Ternak	89.199.800,00
5.2.2.02.09	Belanja Bahan Percontohan	31.450.000,00
5.2.2.02.10	Belanja Bahan Pelatihan	480.695.000,00
5.2.2.02.11	Belanja Bahan Makanan	930.612.510,00
5.2.2.02.12	Belanja Bahan Baku Pemeliharaan	27.000.000,00
5.2.2.02.13	Belanja Dekorasi/Publikasi	1.236.087.590,00
5.2.2.02.14	Belanja Perbekalan Kesehatan	2.377.372.986,00
5.2.2.02.15	Belanja Bahan Lainnya	299.450.500,00
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor	47.465.389.478,00
5.2.2.03.01	Belanja Telepon	882.213.520,00
5.2.2.03.02	Belanja Air	696.615.688,00
5.2.2.03.03	Belanja Listrik	16.374.498.380,00
5.2.2.03.04	Belanja Internet	437.865.840,00
5.2.2.03.05	Belanja Surat Kabar/Majalah	301.381.600,00
5.2.2.03.06	Belanja Transaksi Keuangan	23.541.500,00
5.2.2.03.07	Belanja Paket/Pengiriman	71.285.000,00
5.2.2.03.08	Belanja Jasa Kebersihan	34.260.000,00
5.2.2.03.09	Belanja Jasa Pemeliharaan/Service	1.479.319.600,00
5.2.2.03.10	Belanja Jasa Publikasi/Pengumuman	99.103.000,00
5.2.2.03.11	Belanja Jasa Pihak Ketiga	21.106.869.850,00
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Uji Laboratorium	189.060.500,00
5.2.2.03.13	Jasa Pelayanan Kesehatan	5.743.875.000,00
5.2.2.03.14	Jasa Persertifikatan Tanah	25.500.000,00



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.04	Belanja Premi Asuransi	16.408.074.562,00
5.2.2.04.01	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	51.744.000,00
5.2.2.04.03	Belanja Luran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan	16.356.330.562,00
5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	3.307.873.200,00
5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service	895.837.700,00
5.2.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	1.462.805.400,00
5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	389.006.100,00
5.2.2.05.04	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan	558.623.200,00
5.2.2.05.05	Belanja uji KIR	1.600.800,00
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.221.950.199,00
5.2.2.06.01	Belanja Cetak	4.868.399.725,00
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan	3.291.641.374,00
5.2.2.06.03	Belanja Dokumentasi	61.909.100,00
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.798.613.400,00
5.2.2.07.02	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	1.743.613.400,00
5.2.2.07.03	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	55.000.000,00
5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	289.885.000,00
5.2.2.08.01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	289.885.000,00
5.2.2.09	Belanja Sewa Alat Berat	367.900.000,00
5.2.2.09.01	Belanja Sewa Eskavator	333.200.000,00
5.2.2.09.02	Belanja Sewa Bulldoser	31.500.000,00
5.2.2.09.03	Belanja Sewa Alat Berat Lainnya	3.200.000,00
5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.256.473.500,00
5.2.2.10.01	Belanja Sewa Meja Kursi	156.805.000,00
5.2.2.10.03	Belanja Sewa Tenda	297.125.000,00
5.2.2.10.04	Belanja Sewa Sound Sistem	321.160.000,00
5.2.2.10.05	Belanja Sewa Panggung dan Perlengkapannya	245.507.500,00
5.2.2.10.06	Belanja Sewa Proyektor	1.975.000,00
5.2.2.10.07	Belanja Sewa Generator	66.900.000,00
5.2.2.10.08	Belanja Sewa Hiburan	1.401.000.000,00
5.2.2.10.09	Belanja Sewa Alat Olah Raga	251.000,00
5.2.2.10.10	Belanja Sewa Alat Kesenian	16.250.000,00
5.2.2.10.11	Belanja Sewa Pakaian	61.500.000,00
5.2.2.10.12	Belanja Sewa Tanah	1.248.000.000,00
5.2.2.10.13	Belanja Sewa Satelit	1.440.000.000,00
5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	19.290.967.850,00
5.2.2.11.01	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	970.625.000,00
5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.193.916.150,00
5.2.2.11.03	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	1.729.792.000,00
5.2.2.11.04	Belanja Makanan dan Minuman Pasien	11.880.000,00
5.2.2.11.05	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	9.592.279.700,00
5.2.2.11.06	Belanja Makanan dan Minuman Satpol Pp	85.500.000,00
5.2.2.11.07	Belanja Makanan dan Minuman Acara Khusus	706.975.000,00
5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	979.712.400,00
5.2.2.12.02	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	147.200.000,00
5.2.2.12.03	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	242.200.000,00
5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	175.006.000,00
5.2.2.12.05	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	18.000.000,00
5.2.2.12.06	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	151.000.000,00
5.2.2.12.07	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	24.700.000,00
5.2.2.12.08	Belanja Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	130.983.400,00
5.2.2.12.09	Belanja Pakaian Dinas Pemadam Kebakaran	48.160.000,00
5.2.2.12.10	Belanja Pakaian Dinas Perhubungan	42.463.000,00
5.2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	207.494.000,00
5.2.2.13.01	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	207.494.000,00
5.2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	1.049.736.000,00
5.2.2.14.01	Belanja Pakaian Korpri	6.000.000,00
5.2.2.14.03	Belanja Pakaian Batik/Lurik	103.273.000,00
5.2.2.14.04	Belanja Pakaian Pramuka	4.000.000,00
5.2.2.14.05	Belanja Pakaian Olahraga	750.403.000,00
5.2.2.14.06	Belanja Pakaian Ibadah	88.600.000,00
5.2.2.14.07	Belanja Pakaian Jaket	31.600.000,00
5.2.2.14.09	Belanja Pakaian Pasukan Pengibar Bendera	36.800.000,00
5.2.2.14.10	Belanja Pakaian Sekolah	4.660.000,00
5.2.2.14.11	Belanja Pakaian Hari Tertentu	24.400.000,00
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	35.320.644.140,00
5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.727.532.650,00
5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	23.745.801.490,00
5.2.2.15.03	Biaya Representasi	4.300.000,00
5.2.2.15.04	Belanja Sewa Taksi	11.757.000,00
5.2.2.15.05	Belanja Sewa Penginapan Hotel	234.497.000,00
5.2.2.15.06	Belanja Tiket Pesawat Terbang	149.617.000,00
5.2.2.15.07	Belanja Sewa Kendaraan	447.139.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.2.16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	9.000.000,00
5.2.2.16.02	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	6.000.000,00
5.2.2.16.05	Belanja Bantuan Mahasiswa Tugas Belajar	3.000.000,00
5.2.2.17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis	9.706.621.000,00
5.2.2.17.01	Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan	1.312.450.000,00
5.2.2.17.03	Belanja Pendidikan dan Pelatihan	3.428.154.000,00
5.2.2.17.04	Belanja Transportasi Pengajar	250.000,00
5.2.2.17.05	Belanja Uang Saku Peserta	4.965.767.000,00
5.2.2.20	Belanja Pemeliharaan	2.948.474.000,00
5.2.2.20.01	Belanja Pemeliharaan Jalan	2.358.000.000,00
5.2.2.20.03	Belanja Pemeliharaan Irigasi	80.000.000,00
5.2.2.20.04	Belanja Pemeliharaan Marka Jalan	187.000.000,00
5.2.2.20.06	Belanja Pemeliharaan Gedung	259.934.000,00
5.2.2.20.09	Belanja Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan	63.540.000,00
5.2.2.21	Belanja Jasa Konsultansi	2.554.917.000,00
5.2.2.21.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.283.897.000,00
5.2.2.21.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	271.020.000,00
5.2.2.22	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.000.000.000,00
5.2.2.22.01	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	22.000.000.000,00
5.2.2.22.02	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	10.000.000.000,00
5.2.2.23	Belanja Barang dan Jasa BLUD	134.844.131.994,00
5.2.2.23.01	Belanja Barang dan Jasa BLUD RSU	97.849.075.000,00
5.2.2.23.02	Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas	36.995.056.994,00
5.2.2.24	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	17.941.927.234,00
5.2.2.24.01	Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	17.941.927.234,00
5.2.2.25	Belanja Kepesertaan	2.510.729.000,00
5.2.2.25.01	Belanja Kepesertaan Pegawai	1.646.440.000,00
5.2.2.25.02	Belanja Kepesertaan Masyarakat	864.289.000,00
5.2.3	Belanja Modal	240.474.635.174,00
5.2.3.01	Belanja Modal Pengadaan Tanah	142.590.000,00
5.2.3.01.05	Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas Umum	142.590.000,00
5.2.3.02	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat	437.740.000,00
5.2.3.02.05	Belanja Modal Pengadaan Dump Truk	437.740.000,00
5.2.3.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor	7.889.734.000,00
5.2.3.03.03	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Station Wagon	3.890.230.000,00
5.2.3.03.07	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tangki (Air, Minyak, Tinja)	450.000.000,00
5.2.3.03.12	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Sepeda Motor	900.600.000,00
5.2.3.03.15	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Dobel Kabin	660.099.000,00
5.2.3.03.16	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Khusus	1.988.805.000,00
5.2.3.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	59.545.000,00
5.2.3.04.05	Belanja Modal Pengadaantrolley	59.545.000,00
5.2.3.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel	798.397.500,00
5.2.3.08.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompresor	798.397.500,00
5.2.3.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	224.936.700,00
5.2.3.09.05	Belanja Modal Pengadaan Mesin Kompos	50.000.000,00
5.2.3.09.07	Belanja Modal Pengadaan Handsprayer	700.000,00
5.2.3.09.08	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemotong Kayu	8.000.000,00
5.2.3.09.09	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput	56.874.500,00
5.2.3.09.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya	109.362.200,00
5.2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	730.773.600,00
5.2.3.10.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	5.890.000,00
5.2.3.10.04	Belanja Modal Pengadaan Mesin Penghancur Kertas	6.200.000,00
5.2.3.10.07	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran	19.204.000,00
5.2.3.10.08	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	10.270.200,00
5.2.3.10.09	Belanja Modal Pengadaan Tempat Sampah	121.850.000,00
5.2.3.10.10	Belanja Modal Pengadaan Mesin Absen Pegawai	2.875.000,00
5.2.3.10.11	Belanja Modal Pengadaan Mesin Pembersih Lantai	10.000.000,00
5.2.3.10.12	Belanja Modal Pengadaan Genset	486.162.700,00
5.2.3.10.14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Jahit	20.299.200,00
5.2.3.10.15	Belanja Modal Pengadaan Lemari Es	15.000.000,00
5.2.3.10.16	Belanja Modal Pengadaan Mesin Cuci	33.022.500,00
5.2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	2.185.240.607,00
5.2.3.11.01	Belanja Modal Pengadaan Almari	430.215.700,00
5.2.3.11.02	Belanja Modal Pengadaan Brankas	2.910.000,00
5.2.3.11.03	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet	134.732.400,00
5.2.3.11.04	Belanja Modal Pengadaan White Board	3.000.000,00
5.2.3.11.05	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	3.717.600,00
5.2.3.11.06	Belanja Modal Pengadaan Podium	2.475.000,00
5.2.3.11.07	Belanja Modal Pengadaan Air Conditioner (AC)	437.385.100,00
5.2.3.11.08	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	34.625.886,00
5.2.3.11.09	Belanja Modal Pengadaan Televisi	122.300.000,00
5.2.3.11.10	Belanja Modal Pengadaan LCD/Proyektor	338.836.700,00
5.2.3.11.11	Belanja Modal Pengadaan Meja Pelayanan	43.294.000,00

Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.11.14	Belanja Modal Pengadaan Unit Files/Kardex/Box	1.200.000,00
5.2.3.11.15	Belanja Modal Pengadaan Rak	245.028.800,00
5.2.3.11.20	Belanja Modal Pengadaan Pengeras Suara (Loud Speaker)	2.521.400,00
5.2.3.11.21	Belanja Modal Pengadaan Amplifier	26.823.200,00
5.2.3.11.22	Belanja Modal Pengadaan Colum/Calling/Box Speaker	3.750.000,00
5.2.3.11.23	Belanja Modal Pengadaan Megaphone	16.946.100,00
5.2.3.11.24	Belanja Modal Pengadaan Microphone dan Kelengkapannya	9.480.200,00
5.2.3.11.25	Belanja Modal Pengadaan Wireles	87.274.801,00
5.2.3.11.26	Belanja Modal Pengadaan Faximili	6.700.000,00
5.2.3.11.27	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	232.023.720,00
5.2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Komputer	10.274.349.700,00
5.2.3.12.01	Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/Server	634.000.000,00
5.2.3.12.02	Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC	4.037.109.100,00
5.2.3.12.03	Belanja Modal Pengadaan Laptop/Note Book	908.841.400,00
5.2.3.12.04	Belanja Modal Pengadaan Printer	365.284.200,00
5.2.3.12.05	Belanja Modal Pengadaan Scanner	29.063.000,00
5.2.3.12.06	Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display	131.908.100,00
5.2.3.12.07	Belanja Modal Pengadaan Ups/Stabilizer	72.635.900,00
5.2.3.12.08	Belanja Modal Pengadaan Hard Disk	7.055.400,00
5.2.3.12.09	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer	55.088.400,00
5.2.3.12.10	Belanja Modal Pengadaan Software/Program Original	249.379.000,00
5.2.3.12.11	Belanja Modal Perlengkapan Tcp/Ip dan Jaringan	2.429.676.500,00
5.2.3.12.12	Belanja Modal Pengadaan Sarpras Ktp Elektronik	1.315.679.000,00
5.2.3.12.13	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Lainnya	38.629.700,00
5.2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	1.034.563.100,00
5.2.3.13.01	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja	158.055.100,00
5.2.3.13.02	Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat	98.565.700,00
5.2.3.13.03	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja	168.952.500,00
5.2.3.13.04	Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat	381.950.000,00
5.2.3.13.05	Belanja Modal Pengadaan Meja dan Kursi Makan	6.000.000,00
5.2.3.13.07	Belanja Modal Pengadaan Meja Kursi Tamu	190.907.800,00
5.2.3.13.08	Belanja Modal Pengadaan Meja Komputer	22.557.000,00
5.2.3.13.09	Belanja Modal Pengadaan Podium/Mimbar	7.125.000,00
5.2.3.13.10	Belanja Modal Pengadaan Meja Telpn	450.000,00
5.2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	347.122.592,00
5.2.3.14.01	Belanja Modal Pengadaan Tabung Gas	1.486.000,00
5.2.3.14.02	Belanja Modal Pengadaan Kompor Gas	21.000.000,00
5.2.3.14.04	Belanja Modal Pengadaan Dispenser	9.560.000,00
5.2.3.14.05	Belanja Modal Pengadaan Kulkas	219.866.792,00
5.2.3.14.06	Belanja Modal Pengadaan Rak Piring	198.500,00
5.2.3.14.07	Belanja Modal Pengadaan Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau	32.191.900,00
5.2.3.14.09	Belanja Modal Pengadaan Kitchen Set	46.552.400,00
5.2.3.14.10	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Dapur	16.267.000,00
5.2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	142.102.100,00
5.2.3.15.03	Belanja Modal Pengadaan Gorden	140.377.100,00
5.2.3.15.04	Belanja Modal Pengadaan Hiasan Ruangan	1.725.000,00
5.2.3.16	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio	621.801.100,00
5.2.3.16.01	Belanja Modal Pengadaan Kamera	343.062.800,00
5.2.3.16.02	Belanja Modal Pengadaan Handycam	25.047.200,00
5.2.3.16.03	Belanja Modal Pengadaan Lensa Kamera	6.322.000,00
5.2.3.16.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu	44.000.000,00
5.2.3.16.05	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Audio Monitor	62.034.000,00
5.2.3.16.06	Belanja Modal Perlengkapan Studio	127.035.100,00
5.2.3.16.07	Belanja Modal Pengadaan CCTV	14.300.000,00
5.2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Komunikasi	374.374.300,00
5.2.3.17.01	Belanja Modal Pengadaan Telepon	285.400.000,00
5.2.3.17.04	Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie)	88.974.300,00
5.2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur	1.022.631.300,00
5.2.3.18.01	Belanja Modal Pengadaan Timbangan	218.981.300,00
5.2.3.18.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Uji Kendaraan	170.000.000,00
5.2.3.18.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur Waktu	4.000.000,00
5.2.3.18.13	Belanja Modal Pengadaan Alat Tera Ulang	629.650.000,00
5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	11.789.200.292,00
5.2.3.19.01	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum	11.661.854.692,00
5.2.3.19.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kebidanan dan Penyakit Kandungan	85.000.000,00
5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Keperawatan	36.850.000,00
5.2.3.19.17	Belanja Modal Peralatan Rumah Sakit	5.495.600,00
5.2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium	1.422.547.650,00
5.2.3.20.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	900.047.600,00
5.2.3.20.05	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Peternakan	32.772.500,00
5.2.3.20.09	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah	54.204.050,00
5.2.3.20.10	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kedokteran	435.523.500,00
5.2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	48.925.258.180,00



Kode Rekening	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.2.3.21.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	48.925.258.180,00
5.2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	9.234.202.300,00
5.2.3.22.04	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan Diatas Air	9.234.202.300,00
5.2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	24.830.530.600,00
5.2.3.23.05	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Irigasi	13.770.506.500,00
5.2.3.23.06	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air Bersih/Air Minum	1.988.327.100,00
5.2.3.23.09	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase	2.085.941.000,00
5.2.3.23.10	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	6.985.756.000,00
5.2.3.24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	1.844.860.600,00
5.2.3.24.04	Belanja Modal Pengadaan Lampu Penerangan Jalan	784.700.000,00
5.2.3.24.05	Belanja Modal Pembangunan Taman	1.060.160.600,00
5.2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon	1.215.442.000,00
5.2.3.25.01	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik	1.215.442.000,00
5.2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan	54.171.517.470,00
5.2.3.26.01	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	40.337.358.495,00
5.2.3.26.03	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	55.400.000,00
5.2.3.26.09	Belanja Modal Pengadaan Pagar Pengaman Gedung	2.197.214.000,00
5.2.3.26.12	Belanja Moda Pengadaan Konstruksi Bangunan Atap	299.579.000,00
5.2.3.26.17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Pasar Hewan	9.206.902.200,00
5.2.3.26.18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan Lainnya	2.075.063.775,00
5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	212.110.000,00
5.2.3.27.09	Belanja Modal Pengadaan Buku Bahasa dan Sastra	25.500.000,00
5.2.3.27.10	Belanja Modal Pengadaan Buku Keagamaan	11.600.000,00
5.2.3.27.12	Belanja Modal Pengadaan Buku Seni dan Budaya	63.500.000,00
5.2.3.27.13	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum	25.250.000,00
5.2.3.27.14	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Sosial	13.350.000,00
5.2.3.27.16	Belanja Modal Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	43.630.000,00
5.2.3.27.21	Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-Undangan	29.280.000,00
5.2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, dan Kebudayaan	30.000.000,00
5.2.3.28.04	Belanja Modal Pengadaan Pahatan	30.000.000,00
5.2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	69.451.000,00
5.2.3.29.02	Belanja Modal Pengadaan Ternak	55.545.000,00
5.2.3.29.04	Belanja Modal Pengadaan Ikan	13.906.000,00
5.2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Persenjataan/Keamanan	32.122.000,00
5.2.3.30.05	Belanja Modal Pengadaan Tenda	9.000.000,00
5.2.3.30.06	Belanja Modal Pengadaan Alarm/Sirene	19.095.000,00
5.2.3.30.10	Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan Lainnya	4.027.000,00
5.2.3.31	Belanja Modal Pengadaan Keamanan Jalan	1.770.984.500,00
5.2.3.31.01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Traffic Light	597.634.500,00
5.2.3.31.02	Belanja Modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas	164.700.000,00
5.2.3.31.05	Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Keamanan Jalan	1.008.650.000,00
5.2.3.32	Belanja Modal BOS	15.290.600.000,00
5.2.3.32.01	Belanja Modal BOS SD	10.000.000.000,00
5.2.3.32.02	Belanja Modal BOS SMP	5.290.600.000,00
5.2.3.33	Belanja Modal BLUD	43.349.906.983,00
5.2.3.33.01	Belanja Modal BLUD RSU	40.674.109.900,00
5.2.3.33.02	Belanja Modal BLUD Puskesmas	2.675.797.083,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(67.807.769.127,00)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	82.807.769.127,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (silpa)	67.807.769.127,00
6.1.1.04	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	67.807.769.127,00
6.1.1.04.02	Belanja Pegawai dari Belanja Langsung	67.807.769.127,00
6.1.7	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.1.7.01	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.1.7.01.06	Penerimaan Retensi	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000.000,00
6.2.5	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2.5.01	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga	15.000.000.000,00
6.2.5.01.06	Retensi/Jaminan Pemeliharaan	15.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>67.807.769.127,00</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>0,00</b>


  
**BUPATI TEMANGGUNG**
  

  
**M. AL KHADZIQ**